

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Rosadi, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumedang, 7 Maret 2022

Pihak kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kabupaten Sumedang



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

H. Rosadi, S.Sos.,M.Si

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

| No | Program | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|--|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial | 2 dokumen | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 2,364,795,000.00 |
| | | Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 1 laporan | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 35,000,000.00 |
| | | Jumlah orang asing | 35 | Pengawasan Orang Asing | 35,000,000.00 |
| | | Jumlah laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah-daerah | 5 Laporan | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 2,329,795,000,00 |
| | | Jumlah kegiatan | 4 | Penanganan Konflik Sosial | 100,000,000.00 |
| | | Jumlah rakor | 36 | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) | 1,409,945,900.00 |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Penguatan Forkopimda | 102,400,000.00 |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari-hari Besar Keagamaan dul fitri | 703,075,000.00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---|--|-----------------------------|
| | Jumlah kegiatan | 1 | Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) Hari Natal dan Tahun Baru 2023 | 196,941,100.00 |
| | Jumlah kegiatan | 1 | Bintek Intelijen | 41,072,000.00 |
| JUMLAH | | | | Rp. 2,364,795,000.00 |

Sumedang, 7 Maret 2022

Pihak kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik

H. Rosadi, S.Sos., M.Si

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI SUPARMAN, S.H.**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumedang, 7 Maret 2022

Pihak kedua
Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan



Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

DEDI SUPARMAN, S.H.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

| No | Program | Indikator Kinerja | Target | Kegiatan/ Sub Kegiatan/ AKtivitas Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|--|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan | 1 Dokumen | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 200.000.000,00 |
| | | Jumlah laporan bahan Perumusan Kebijakan Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | 2 laporan | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 200.000.000,00 |
| | | Jumlah Ormas kategori aktif | 540 | Pembinaan dan Pengawaasan Ormas | 150,000,000.00 |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Hibah JPKP | 50,000,000.00 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 6 Laporan | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1,242,451,000.00 |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 208 Orang | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35,000,000.00 |
| | | Jumlah Parpol | | Kemitraan Partai Politik | 35,000,000.00 |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti | 3 Laporan | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang | 1,207,451,000.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Penelitian Bantuan Keuangan Parpol | 30,205,000.00 |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Bantuan Keuangan Parpol | 927,246,000.00 |
| | | Jumlah kegiatan | 1 | Hibah KPU | 250,000,000.00 |
| J U M L A H | | | | | Rp. 1,442,451,000.00 |

Sumedang, 7 Maret 2022



Pihak kedua
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan

DEDI SUPARMAN, S.H.